



**BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
BIRO HUKUM DAN KOMUNIKASI**

Gedung BPKP Pusat Lantai 7, Jalan Pramuka Nomor 33 Jakarta 13120
Telepon/Faksimili 021-85910030/85910031
E-mail rokumas@bpkp.go.id

Nomor : LKIN-393/SU04/3/2019
Lampiran : Satu berkas
Hal : Laporan Kinerja Biro Hukum dan
Komunikasi Sampai Dengan Triwulan I
Tahun 2019

10 April 2019

Yth.
Sekretaris Utama
di Jakarta

Dengan ini kami sampaikan Laporan Kinerja Biro Hukum dan Komunikasi (Rokumasi) sampai dengan Triwulan I Tahun 2019 sebagai berikut:

1. Outcome

Sesuai Perjanjian Kinerja (Perkin) Tahun 2019, Rokumasi merencanakan *outcome* Persepsi kepuasan layanan Sekretariat Utama dengan target 8 Skala likert. Kinerja *outcome* akan diukur pada Triwulan II dan IV tahun 2019

2. Output

Sesuai Perjanjian Kinerja (Perkin) Tahun 2019, Rokumasi merencanakan *output* sebanyak 15 Kegiatan Layanan Analisis Penyusunan Pengelolaan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan, 30 laporan Telaahan dan Bantuan Hukum, 31 laporan layanan Humas dan HAL dan 1 Kegiatan layanan penyusunan program/rencana kerja dan evaluasi. Target dan realisasi *output* sampai dengan Triwulan I tahun 2019 disajikan dalam Tabel 1.

Tabel 1.
Target dan Realisasi *Output* s.d. Triwulan I 2019

No.	IKK	Output Kinerja				Capaian (%)	
		Satuan	Target		Realisasi	Tahun 2019	s.d. TW I 2019
			Tahun 2019 (Perkin)	s.d. TW I 2019	s.d. TW I 2019		
1	Jumlah Layanan Analisis Penyusunan Pengelolaan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan	Kegiatan	15	1	1	6.67	100.00
2	Jumlah Layanan Penelaahan dan Bantuan Hukum	Laporan	30	7	7	23.33	100.00
3	Jumlah Layanan Kehumasan dan Hubungan Antar Lembaga	Laporan	31	7	4	12.90	57.14
4	Jumlah Layanan Penyusunan Program/Rencana Kerja dan Evaluasi	Kegiatan	1	0	0	0.00	0.00

Realisasi *output* sampai dengan triwulan I tahun 2019 dijelaskan sebagai berikut:

a. Layanan Analisis Penyusunan, Pengelolaan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-Undangan

Indikator kinerja kegiatan “Jumlah Layanan Analisis Penyusunan Pengelolaan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan” diukur dengan menghitung jumlah kegiatan analisis penyusunan, pengelolaan, dan penyebarluasan peraturan perundang-undangan.

Sampai dengan Bulan Triwulan I Tahun 2019 terdapat 1 realisasi *output* berupa kegiatan atau mencapai 100% dari target yang telah ditentukan dalam perjanjian kinerja yaitu sejumlah 1 kegiatan, yaitu kegiatan Penyusunan Himpunan Peraturan BPKP Tahun 2018.

b. Layanan Penelaahan Hukum dan Bantuan Hukum

Indikator kinerja “Jumlah Layanan Penelaahan dan Bantuan Hukum” diukur dengan menghitung jumlah laporan Penelaahan Hukum dan Penanganan Bantuan Hukum yang dihasilkan.

Sampai dengan Triwulan I Tahun 2019 terdapat 7 realisasi *output* berupa laporan atau mencapai 100% dari target yang telah ditentukan dalam perjanjian kinerja yaitu sejumlah 7 Laporan.

c. Layanan Kehumasan dan Hubungan Antar Lembaga

Indikator kinerja “Layanan Kehumasan dan Hubungan Antar Lembaga” diukur dari jumlah Laporan Layanan Hubungan Masyarakat dan Hubungan Antar Lembaga yang dihasilkan.

Sampai dengan Triwulan I Tahun 2019 terdapat 4 realisasi *output* berupa laporan atau mencapai 57,14% dari target yang telah ditentukan dalam perjanjian kinerja yaitu sejumlah 7 Laporan, hal ini dikarenakan laporan yang bersifat Triwulanan disusun setelah periode Triwulan 1 berakhir tetapi kegiatannya telah dilaksanakan selama Triwulan I.

d. Layanan Penyusunan Program/Rencana Kerja dan Evaluasi

Layanan Penyusunan Program/Rencana Kerja dan Evaluasi ini merupakan pelaksanaan kegiatan pembinaan administrasi, pengelolaan kepegawaian dan pengelolaan keuangan.

Indikator kinerja “Layanan Penyusunan Program/Rencana Kerja dan Evaluasi” diukur dari jumlah Kegiatan Penyusunan Program/Rencana Kerja dan Evaluasi yang dihasilkan.

Pada Triwulan I Tahun 2019 belum ada realisasi *output* berupa kegiatan yang dilaksanakan.

3. Program Kerja Administrasi Umum (PKAU)

PKAU Biro Hukum dan Komunikasi meliputi Layanan Analisis Penyusunan Pengelolaan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan; Layanan Penelaahan dan Bantuan Hukum; Layanan Kehumasan dan Hubungan Antar Lembaga; dan Layanan Penyusunan Program/Rencana Kerja dan Evaluasi. Target dan realisasi kegiatan disajikan dalam Tabel 2.

Tabel 2.
Target dan Realisasi Kegiatan PKAU Triwulan I Tahun 2019

No.	IKK	Kegiatan PKAU (PP)			Capaian (%)		Realisasi Laporan	% Real. Laporan terhadap Real PP
		Target		Realisasi	Tahun 2019	s.d. Triwulan I		
		Tahun 2019	s.d. Triwulan I	s.d. Triwulan I				
		Jumlah	Jumlah	2019		2019	s.d. TW I 2019	
1	Jumlah Layanan Analisis Penyusunan Pengelolaan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan	15	1	1	6.67	100.00	1	100
2	Jumlah Layanan Penelaahan dan Bantuan Hukum	30	7	7	23.33	100.00	7	100
3	Jumlah Layanan Kehumasan dan Hubungan Antar Lembaga	31	7	4	12.90	57.14	4	57.14
4	Jumlah Layanan Penyusunan Program/Rencana Kerja dan Evaluasi	1	0	0	0.00	0.00	0	0
	Jumlah	77	15	12	15.58	80.00	12	80

Kegiatan PKAU untuk IKK Layanan Penyusunan Program/Rencana Kerja dan Evaluasi tidak terdapat target dalam Bulan Triwulan I Tahun 2019.

4. Penggunaan Hari Produktif

Jumlah pegawai pada Biro Hukum dan Humas sebanyak 40 orang terdiri dari 10 orang pejabat struktural, 11 PFA, 1 PFT, dan 18 PFU. Penggunaan hari produktif sampai dengan Triwulan I Tahun 2019 adalah sebanyak 1.250 OH atau sebesar 90,17% dari rencana Triwulan I sebanyak 1.386 OH dan tercapai 22.54% dari rencana tahun 2019 sebanyak 5.545 OH. Target dan realisasi penggunaan hari produktif disajikan dalam Tabel 3.

Tabel 3.
Target dan Realisasi Hari Produktif s.d Triwulan I Tahun 2019

No.	IKK	OH			Capaian (%)	
		Target		Realisasi	Tahun 2019	s.d. Triwulan I
		Tahun 2019	s.d. Triwulan I	s.d. Triwulan I		
		Jumlah	Jumlah	2019		
1	Jumlah Layanan Analisis Penyusunan Pengelolaan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan	1,896	474	481	25.37	101.48
2	Jumlah Layanan Penelaahan dan Bantuan Hukum	2,259	565	436	19.30	77.17
3	Jumlah Layanan Kehumasan dan Hubungan Antar Lembaga	1,120	280	333	29.73	118.93
4	Jumlah Layanan Penyusunan Program/Rencana Kerja dan Evaluasi	270	68	0	0.00	0.00
	Jumlah	5,545	1,386	1250	22.54	90.19

Tabel 3 menunjukkan penggunaan OH pada IKK Layanan Penyusunan Program/Rencana Kerja dan Evaluasi belum ada, hal ini dikarenakan target IKK akan dilaksanakan pada akhir tahun.

5. Penyerapan Anggaran

Anggaran Biro Hukum dan Komunikasi tahun 2019 sebesar Rp2.608.689.000,00. Rincian rencana dan realisasi penyerapan disajikan dalam Tabel 4.

Tabel 4. Penyerapan Anggaran s.d Triwulan I Tahun 2019

6.

No.	IKK	Anggaran (Rp)		Realisasi (Rp)	Penyerapan (%)	
		Tahun 2019	s.d. Triwulan I	s.d. Triwulan I	Tahun 2019	s.d. Triwulan I
1	2	3	4	5	6 = 5/3	7 = 5/4
1	Jumlah Layanan Analisis Penyusunan Pengelolaan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan	504,054,000.00	31,910,000.00	56,537,830.00	11.22	177.18
2	Jumlah Layanan Penelaahan dan Bantuan Hukum	907,496,000.00	74,600,000.00	161,525,448.00	17.80	216.52
3	Jumlah Layanan Kehumasan dan Hubungan Antar Lembaga	1,129,559,000.00	146,507,350.00	195,328,203.00	17.29	133.32
4	Jumlah Layanan Penyusunan Program/Rencana Kerja dan Evaluasi	67,560,000.00	-	2,378,000.00	3.52	-
	Jumlah	2,608,669,000	253,017,350.00	415,769,481.00	15.94	164.32

Tabel 4 menunjukkan bahwa realisasi anggaran sampai dengan Triwulan I 2019 sebesar Rp415,769,481.00 atau sebesar 164.32% dari rencana Triwulan I 2019 yang sama dan tercapai 15.94% dari rencana tahun 2019 sebesar Rp2.608.689.000,00. Demikian Laporan Kinerja Biro Hukum dan Komunikasi sampai dengan Triwulan I Tahun 2019 kami sampaikan.

Atas perhatian dan perkenan Sekretaris Utama, kami ucapkan terima kasih.

Kepala Biro,

ttd

Syaifudin Tagamal